

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Oleh

Salihi¹, Ignasius Ridwan Hutauruk², Hasnarika³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang

Email: ¹salihi@Stie-Pembangunan.ac.id, ²iii.ignasius@gmail.com,

³hasnarika201189@gmail.com

Abstract

The purpose of this research was to determine the effect of accountability and transparency on local government performance in the Regional Work Units (SKPD) of Bintan Regency. The method used in this research is quantitative associative method. Respondents in this study were sub-district employees in Bintan Regency as many as 39 people. Methods of data collection is done by using a questionnaire. The data analysis method used in this study is multiple linear regression using SPSS Ver.25. The conclusions obtained indicate that accountability and transparency affect the performance of local governments. The better the accountability and transparency implemented by Bintan Regency, the better the performance of the local government. The results of the discussion show that there is a partial and simultaneous influence between accountability and transparency on local government performance. This explains that accountability and transparency have succeeded in increasing the performance of local governments with a value of 41.6%.

Keywords: Accountability, Transparency, Performance

PENDAHULUAN

Mardiasmo (2018) menyatakan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur secara baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Masalah-masalah tersebut juga menghambat proses pemulihan ekonomi di Indonesia sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Seluruh kondisi saat ini pun menunjukkan masih berlangsungnya

praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi.

Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah adalah buruknya kinerja pelayanan publik. Dimana keluhan masyarakat beberapa tahun terakhir yang berkaitan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik yang menduduki peringkat pertama masih keluhan mengenai kinerja pemerintah daerah. Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2021 jumlah laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI sebanyak 7.186 laporan dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah Pemerintah Daerah yakni sebanyak 2.945 (40,99%).

Syahrída (Nasution, 2018) menjelaskan bahwa dari sekian banyak *problem* yang ada

pada pemerintah daerah salah satunya adalah masalah tentang akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelola keuangan daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dilakukan secara cermat agar dapat menyelesaikan kendala-kendala pada akuntansi dan dapat melakukan penyajian informasi keuangan secara memadai. Lebih lanjut Mardiasmo (2018) menyampaikan sistem pertanggung-jawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan baik, apabila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula.

Akuntansi sektor publik masih terbilang baru dalam bidang akuntansi, namun dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik maka era reformasi membawa dampak terhadap tuntutan akuntabilitas (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Dimana kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Akuntabilitas dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, lebih lanjut Kusumastuti (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala

kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggung-jawabannya kepada publik.

Kemudian transparansi dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Tanjung (2014) menyampaikan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat secara jelas semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan adanya kinerja pemerintah keuangan daerah yang akurat akan menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam setiap kegiatan sehingga kegiatan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyebabkan pengelola pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.

LANDASAN TEORI

Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata asing “*to account*” yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pengolahan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pengelola untuk menjalankan kegiatan perusahaan (Sujarweni, 2019). Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sebuah sistem informasi yang

memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi sering dianggap sebagai bahasa bisnis, dimana informasi bisnis dikomunikasikan kepada *stakeholders* melalui laporan akuntansi (Hery, 2017).

Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Kemudian Mahmudi (2019) mendefinisikan akuntabilitas merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).

Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa dalam akuntabilitas perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik

pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Jenis-Jenis Akuntabilitas

Mahmudi (2019) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis diantaranya akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Setiap petugas publik baik individu maupun kelompok secara bertahap akan memberikan pertanggungjawabannya kepada atasannya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara terstruktur maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.
2. Akuntansi horizontal (*horizontal accountability*), adalah pertanggungjawaban kepada publik secara luas. Setiap lembaga negara baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memberikan pertanggungjawabannya atas semua amanat yang diterima dan dilaksanakannya untuk diberitahukan kepada masyarakat.

Indikator Akuntabilitas Publik

Mahmudi (2019) menyampaikan bahwa akuntabilitas publik memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
2. Akuntabilitas manajerial, merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat

diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya

3. Akuntabilitas program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggung-jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan.

Transparansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Mardiasmo (2018) menyampaikan bahwa transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Prinsip-Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Pasaribu (Audyta *et al.*, 2013) mengatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya Werimon (Audyta *et al.*, 2013) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari:

1. Adanya sistem pelaporan keuangan.
2. Adanya sistem pengukuran kinerja.
3. Dilakukannya auditing sektor publik.
4. Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Indikator Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Mardiasmo (2018) menyampaikan indikator transparansi adalah sebagai berikut:

1. *Invormativeness* (informatif), merupakan pemberian informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
2. *Openness* (keterbukaan), merupakan keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk dapat memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. *Disclosure* (pengungkapan), merupakan pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial

Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Depkeu, 2014) menyampaikan bahwa kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Bastian (2017) menyampaikan kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Mahsun (2016) menyatakan terdapat empat pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik yaitu:

1. Analisis Anggaran, adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Hasil yang diperoleh berupa selisih lebih (*favourable variance*) atau selisih kurang (*unfavourable variance*). Teknik ini berfokus pada kinerja input yang bersifat finansial. Data yang digunakan untuk dasar analisis adalah anggaran dan laporan realisasi anggaran.
2. Analisis Rasio Laporan Keuangan, merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Pengukuran kinerja didasarkan atas penghitungan rasio-rasio keuangan, misalnya rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar.
3. *Balanced Scorecard Method*, yakni pengukuran kinerja dengan berbasis pada

aspek finansial dan nonfinansial. Dimana dimensi pengukuran mencakup 4 (empat) perspektif yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif inovasi pembelajaran.

4. Performance Audit, adalah pengukuran dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggarannya.

Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Halim & Kusufi (2017) menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen dalam pengukuran kinerja keuangan diantaranya:

1. Ekonomi, adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan.
2. Efisiensi, merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan *value vor money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
3. Efektivitas, adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode bersifat asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang

berlandaskan pada *filosofat positivisme*, digunakan untuk meliputi pada populasi atau sampel tertentu.

Populasi dan Sampel

Populasi

Dalam penelitian ini, responden yang dianggap tepat dengan tujuan penelitian ini adalah bendahara pengeluaran pada SKPD Kabupaten Bintang sebanyak 39 orang.

Sampel

Sampel penelitian ini adalah mengambil 100% jumlah populasi yakni bendahara pengeluaran pada SKPD Kabupaten Bintang sebanyak 39 orang responden.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode berikut:

- Observasi, dimana penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian pada SKPD Kabupaten Bintang.
- Kuesioner, yaitu penelitian ini digunakan untuk menggali data tanggapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten Bintang yang dituangkan ke dalam setiap butiran pertanyaan. Pegawai cukup memberikan tanda *checklist* dikolom yang disediakan.
- Kepustakaan, yaitu penulis melakukannya dengan cara mengumpulkan, mempelajari teori-teori, artikel, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diangkat peneliti.

Teknik Analisis Data

Uji Regresi Linear Berganda

Dalam regresi linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya suatu uji multikolinieritas dan tidak adanya heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Parsial (Uji t)

Nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel, kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

- Ho diterima jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ atau dengan nilai $\text{sig.} > 0.05$.
- Ha diterima jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ atau dengan nilai $\text{sig.} < 0.05$.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersamaan digunakan untuk penelitian dalam mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- Apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ atau probabilitas $< \text{nilai signifikan}$ ($\text{Sig} < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Apabila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ atau probabilitas $> \text{nilai signifikan}$ ($\text{Sig} > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bintang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Dimana diperoleh nilai $t \text{ hitung}$ $3,026 > t \text{ tabel}$ $2,028$ dan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Hal ini menjelaskan semakin baik akuntabilitas yang dimiliki Pemerintah Daerah maka akan semakin meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah. Sehingga hasil penelitian menunjukkan hipotesis akhir dari pengujian ini yaitu H_a diterima dan H_0 ditolak.

Diketahui hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Umar *et al.* (2022) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Instansi Inspektorat Aceh. Akuntabilitas tinggi pada pengelolaan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga menciptakan iklim investasi yang baik. Dengan menjalankan asas akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan (*disclosure*) segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak-pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut maka kualitas kinerja pemerintah daerah baik dari sisi *financial* dapat meningkat dan menjadi lebih baik guna mendorong terwujudnya *good governance*.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bintan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Dimana diperoleh nilai t hitung $3,054 > t$ tabel $2,028$ dan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Hal ini menjelaskan semakin baik transparansi yang dimiliki Pemerintah Daerah maka akan semakin meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah. Sehingga hasil penelitian menunjukkan hipotesis akhir dari pengujian ini yaitu H_a diterima dan H_0 ditolak

Diketahui hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Turalaki *et al.* (2017) bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Secara teoritis pemerintah harus menangani dengan baik kinerjanya dengan memperhatikan 2 aspek transparansi, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi harus seimbang, menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Transparansi akan terwujud apabila pemerintah bersedia untuk menginformasikannya kepada masyarakat atau DPRD bagaimana dana publik digunakan atau dikelola dalam kegiatan dan program pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bintan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa besarnya nilai F hitung sebesar $14,515$ dengan taraf signifikan sebesar $0,000$. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung $14,515 > F$ tabel $4,11$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Dimana hasil pengujian koefisien determinasi untuk keseluruhan variabel didapat nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar $41,6\%$.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Akuntabilitas (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bintan.
2. Transparansi (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bintan.
3. Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.

Saran

1. Bagi pemerintah Kabupaten Bintan sebagai institusi pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan penelitian ini sebagai bahan masukan dan juga pertimbangan untuk memperhatikannya akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD pemerintah Kabupaten Bintan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan diharapkan dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerapan akuntabilitas dan transparansi

dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

2. Kepada pegawai atau pejabat yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan yang berada pada bidang akuntansi atau pembukuan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dalam peningkatan kinerja. Peningkatan kemampuan melalui berbagai hal sehingga mampu meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik.
3. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan mampu untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, karena penelitian ini hanya berfokus terhadap akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya penelitian yang akan datang juga diharapkan menambah respondennya agar data yang dihasilkan dapat digeneralisasikan pada lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrianto, N. (2017). *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing.
- [2] Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (15th ed.). Rineka Cipta.
- [3] Bastian, I. (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Erlangga.
- [4] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro.
- [5] Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- [6] Harahap, S. S. (2018). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Keempat Be). Raja Grafindo Persada.
- [7] Hery. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition*. PT. Grasindo.
- [8] Husein, U. (2014). *Metode Penelitian*. PT. Raja Grafindo.
- [9] Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting (IFRS Edition)* (2nd ed.). WILEY.
- [10] Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- [11] Mahsun, M. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE.
- [12] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- [13] Moeheriono. (2018). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* (Revisi). Rajawali Press.
- [14] Rivai, V. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Rajawali Press.
- [15] Samryn, L. M. (2015). *Pengantar Akuntansi (Edisi IFRS)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- [16] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- [17] Sujarweni, W. (2019). *Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- [18] Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian*. PT. Refika Aditama.
- [19] Susilowati, L. (2016). *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*. Kalimedia.
- [20] Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2016). *Accounting*. Cengage Learning.
- [21] JURNAL:
- [22] Komang Andrian Utama Putra, & I Ketut Suryanawa. *The Effect of Accountability and Transparency on Effectiveness of Government School Operational Assistance Funds Management*. European Journal of Business and Management Research, Vol.7, Issue 4. July 2022.
- [23] Shinta Turalaki, Jantje J. Tinangon, & Heince R. N. Wokas. *Pengaruh akuntabilitas dan transparansi publik terhadap kinerja pelayanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Bintan Minahasa*

-
- Selatan*. Jurnal EMBA, Vol.5, No.2. Juni 2017. ISSN : 2303-1174.
- [24] Suriana. *The Influence Of Accountability And Transparency Of Financial Management Of Village Funds On Village Government Performance In Kotarih Baru Village Kotarih District Sergai Regency*. International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences-IJERLAS. E-ISSN: 2808-487X.
- [25] Ulfa, Abdul Rahman Mus, Subhan, Muh. Abduh, & Nur Wahyuni. *Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Kantor DPRD Kabupaten Enrekang*. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 5 No. 2, April 2022. e-ISSN : 2622-6383.
- [26] Zulkifli Umar, Cut Fittika Syawalina, & Khairunnisa. *Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja instansi Inspektorat Aceh*. KOLEGIAL-Vol.6, No.2. Desember 2018. P-ISSN 2088-5644; E-ISSN 2614-008X.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN